



Laporan Kinerja Tahun 2023

Inspektorat Kabupaten Balangan

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan 71662
Email : Inspektoratblg@gmail.com



Daftar isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum.....	3
1.4 Isu Strategis	5
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	7
2.2 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	53
3.3 Realisasi Anggaran	55
Bab IV Penutup	61

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Balangan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023. Laporan Kinerja juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Balangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisiensi dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Dengan disusunnya Dokumen LKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan.

Parangin, 16 Februari 2024

Inspektur,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730501 199311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *good governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai salah satu perangkat daerah mengemban tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu "Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera" dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Inspektorat kabupaten Balangan selama kurun waktu 5 tahun kedepan “ **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**”.

Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah “Meningkatnya efektifitas pengawasan internal”. Berikut ini uraian singkat capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023:

1. Level Kapabilitas APIP

Capaian kinerja Level Kapabilitas APIP adalah 100% dari target level 3 realisasi berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal dikarenakan tingkat kepatuhan auditan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Capaian kinerja jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB dari 6 unit yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK.

4. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB berdasarkan hasil evaluasi TIM APIP pada tahun 2023 terdapat 24 SKPD yang mendapatkan predikat BB.

5. Prosentase capaian realisasi renaksi RB kinerja sebesar 89% dari target 75% realisasi 67%, terdapat 282 Rencana Aksi RB dan sebanyak realisasi atas rencana aksi tersebut sebanyak 195.
6. Indeks evektifitas pengendalian korupsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 pada point 2,98 dimana target pada tahun 2023 adalah 2,8.

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama Inspektorat Kabupaten Balangan yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp.25.002.883.060,00 yang diserap sebesar Rp.21.665.401.766,00.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Inspektorat merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Inspektorat, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2023, Inspektorat berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Inspektorat Tahun 2023 adalah adanya keinginan yang kuat dari Inspektorat untuk mewujudkan Good governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good governance ini diimplementasikan oleh Inspektorat dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Balangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Inspektorat kabupaten Balangan sebagai Perangkat Daerah utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pengawasan ditingkat kabupaten, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai entitas utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Balangan berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan anggaran. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Balangan adalah sebagai sarana bagi Pemerintah

Kabupaten Balangan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Memempertanggungjawabkan kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Uraian Tugas Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;

- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas poko dan fungsinya.

1.3.2 Unsur Organisasi Perangkat Daerah

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
1	Inspektur
2	Sekretariat
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

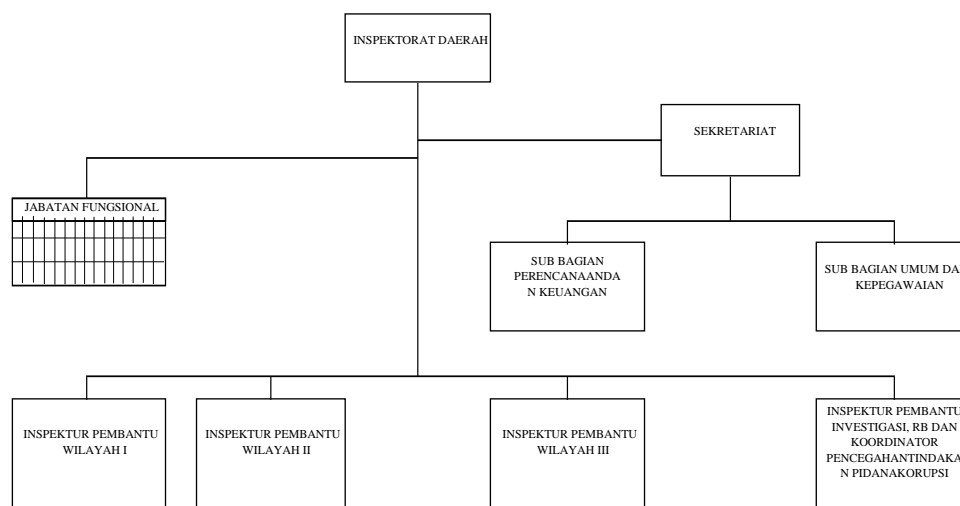
	b. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
3	Inspektur Pembantu Wilayah I
4	Inspektur Pembantu Wilayah II
5	Inspektur Pembantu Wilayah III
6	Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
7	Kelompok Jabatan Fungsional
	a. Auditor b. P2UPD

1.3.3 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT



1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur perangkat daerah yang melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dihadapkan pada beberapa isu strategis, baik isu yang dihadapi secara nasional, maupun pada tataran regional/lokal.

Dari hasil inventarisasi permasalahan strategis, ada beberapa isu yang perlu

mendapat perhatian:

1. Pencegahan dan pengendalian korupsi/kecurangan
2. Kompetensi APIP
3. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan baik pemeriksaan eksternal maupun internal

Isu-isu strategis diatas memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan yang ingin dicapai Inspektorat yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan terukur, Instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. RPJMD memuat Visi dan misi pembangunan. Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dicanangkan merupakan visi misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021-2026, yaitu:

“Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan

Dari lima misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang terkait dengan fungsi pengawasan adalah pada misi ke IV *yaitu*

"Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara". Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Pada tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Inspektorat yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Inspektorat menyusun Dokumen Penyesuaian Renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Tim Kemenpan RB.

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai Inspektorat selaras dengan tujuan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel**"

Tabel 2.1
Target dan indikator tujuan Inspektorat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase SKPD / Desa di wilayah	-	-	78	80	85	90

	yang bersih dan akuntabel	yang bebas temuan material						
		prosentase SKPD dengan nilai saki A	-	-	3	6	9	12

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Balangan terdapat dua sasaran yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan internal”.

b. Indikator Kinerja Strategis Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Strategis yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan dan bersifat menunjang atau tidak mendukung secara langsung pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan. Indikator Kinerja Strategis Inspektorat selama 5 tahun kedepan sesuai yang tertuang dalam dokumen Penyesuaian RENSTRA Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Level Kapabilitas APIP
- b. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM
- d. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB
- e. Prosentase capaian realisasi renaksi RB
- f. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Berikut ini tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Renstra Penyesuaian Periode 2021-2026.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level kapabilitas APIP
			Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

	yang bersih dan akuntabel	internal	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM
			Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB
			Prosentase capaian realisasi renaksi RB
			Indeks evektifitas pengendalian korupsi

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 2.3 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data	
			tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026					
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil QA dari BPKP	Inspektur	Tim Kapabilitas APIP
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan		-	-	80	83	85	88	88	88	Hasil Rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Tim BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan	Inspektur	IRBAN
3	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM		-	-	WBK : 1	WBK : 2	WBK : 3	WBK :3 WBBM : 1	WBK :3 WBBM : 1	WBK :3 WBBM : 1	Hasil evaluasi dari Kemepan RB	Inspektur	IRBANS US
4	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB		-	-	24	26	28	32	32	32	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD oleh APIP	Inspektur	IRBAN

Laporan Kinerja Inspektorat Taban 2023

5	Prosentase capaian realisasi renaksi RB		-	-	75	80	85	90	90	Hasil Monitoring Rencana Aksi RB	Inspektur	IRBANS US
6	Indeks evektifitas pengendalian korupsi		-	-	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	Hasil Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan	Inspektur	IRBAN

Tabel 2.4
Formulasi dan Penanggung Jawab Indikator Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Penanggung Jawab	Sumber Data
				Alasan	Formulasi		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Sebagai tolak ukur atas kualitas/kapabilitas APIP	Hasil QA (Quality Assurance) dari BPKP	Inspektur	Tim Kapabilitas APIP
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Level	Semakin tingginya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menunjukkan bahwa kualitas pengawasan semakin baik dan kepatuhan auditee terhadap hasil pengawasan meningkat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dibagi jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti kali 100 %	Inspektur	IRBAN
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	Nilai	Semakin banyaknya Unit Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menunjukkan kualitas pelayanan yang bersih dan bebas korupsi	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Inspektur	IRBANSUS

		Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	Prosentase	Nilai SAKIP SKPD menjadi salah satu penunjang dalam peningkatan Nilai SAKIP Pemda	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD oleh APIP	Inspektur	IRBAN
2	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase capaian realisasi renaksi RB	Prosentase	Inspektorat di dalam implementasi RB Daerah berperan mengawal RB melalui monitoring dalam rangka memastikan bahwa Rencana Aksi tersebut telah dilakukan oleh Unit Kerja	Jumlah Renaksi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah Renaksi	Inspektur	IRBANSUS

2.2 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan dengan RENSTRA Penyesuaian Inspektorat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2023 terdapat perubahan nilai pagu program kegiatan yang diakomodir dalam RENJA Perubahan Tahun 2023. Adapun faktor perubahan renja adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian program kegiatan mengacu dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026
2. Adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.5

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					Keterangan/Catatan penting	Unit SKPD
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000)	Jumlah Perubahan (+/-)		
Total Pagu					22.119.770.710				25.002.883.060	2.883.112.350		Inspektorat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	Kab. Balangan	72 (BB)	16.182.248.310	Nilai SAKIP Inspektorat	Kab. Balangan	72 (BB)	19.013.498.660	Rp 2.831.250.350,00		Inspektorat
		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Balangan	100%		Nilai IKM Inspektorat	Kab. Balangan	87,88%				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	100%	74.662.400	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	97.762.400	Rp 23.100.000,00		Inspektorat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	23.978.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	23.978.400	Rp -		Inspektorat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	50.684.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	73.784.000	Rp 23.100.000,00		Inspektorat

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Balangan	100%	7.119.790.460	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	9.601.306.610	Rp 2.481.516.150,00		Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	616 orang	7.119.790.460	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	630 orang	9.601.306.610	Rp 2.481.516.150,00	Asumsi terdapat penambahan 34 pegawai	Inspektorat
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Balangan	100%	3.329.853.000	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	3.043.543.000	-Rp 286.310.000,00		Inspektorat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	4 paket	105.133.000	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	4 paket	102.503.000	-Rp 2.630.000,00		Inspektorat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	55 pegawai	808.890.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	65 pegawai	1.039.095.000	Rp 230.205.000,00		Inspektorat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	32 pegawai	2.415.830.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	20 pegawai	1.901.945.000	-Rp 513.885.000,00		Inspektorat
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Balangan	100%	3.638.334.900	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	2.673.209.900	-Rp 965.125.000,00		Inspektorat
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Balangan	7 paket	1.244.722.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	9 paket	1.334.179.800	Rp 89.457.600,00		Inspektorat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	51.290.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	51.295.600	Rp 5.600,00		Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	4.779.700	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	6.748.500	Rp 1.968.800,00		Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	65 laporan	2.337.543.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	65 laporan	1.280.986.000	-Rp 1.056.557.000,00		Inspektorat

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	Kab. Balangan	100%	690.085.800	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	100%	2.175.585.800	Rp 1.485.500.000,00		Inspektorat
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kab. Balangan	0	0.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	6 unit	1.485.500.000	Rp 1.485.500.000,00		Inspektorat
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	4 unit	690.085.800	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	4 unit	690.085.800	Rp -		Inspektorat
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	12 Bulan	342.581.950	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	375.140.950	Rp 32.559.000,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	4.996.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	10.003.500	Rp 5.007.500,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	139.849.450	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	185.451.450	Rp 45.602.000,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	197.736.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	179.686.000	-Rp 18.050.500,00		Inspektorat
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Balangan	12 Bulan	986.939.800	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.046.950.000	Rp 60.010.200,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Balangan	35 unit	360.520.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Balangan	42 unit	420.530.300	Rp 60.010.200,00		Inspektorat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 unit	626.419.700	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 unit	626.419.700	Rp -		Inspektorat

Laporan Kinerja Inspektorat Taban 2023

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Kab. Balangan	78%	4.913.270.000	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	Kab. Balangan	50%	4.817.988.000	-Rp 95.282.000,00		Inspektorat
						Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	Kab. Balangan	50%				
						Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari	Kab. Balangan	50%				
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	Kab. Balangan	55%	4.241.370.000	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	Kab. Balangan	15	4.100.500.000	-Rp 140.870.000,00		Inspektorat
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas		68%		Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat		150				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	497.470.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	375.620.000	-Rp 121.850.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	487.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	325.050.000	-Rp 162.150.000,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	54.500.000	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	16.400.000	-Rp 38.100.000,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	35.000.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	2.600.000	-Rp 32.400.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	6 laporan	3.018.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	6 laporan	3.105.600.000	Rp 87.200.000,00		Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Balangan	4 dokumen	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Balangan	4 dokumen	275.230.000	Rp 126.430.000,00		Inspektorat
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	Kab. Balangan	53%	671.900.000	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Kab. Balangan	100%	717.488.000	Rp 45.588.000,00		Inspektorat
		Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	Kab. Balangan	100%		Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Kab. Balangan	4,028				

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

	Pengawasan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	43.000.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	263.638.000	Rp 220.638.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 Laporan	628.900.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 laporan	453.850.000	-Rp 175.050.000,00		Inspektorat
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Kab. Balangan	- WBK :3 - WBBM : 3	1.024.252.400	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	Kab. Balangan	20	1.171.396.400	Rp 147.144.000,00		Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	Kab. Balangan	3		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	Kab. Balangan	80				
		Indeks Integritas	Kab. Balangan	79		Nilai MCP	Kab. Balangan	91				
		Level kapabilitas APiP	Kab. Balangan	3								
10	Pendampingan dan Asistensi	prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	Kab. Balangan	100%	1.024.252.400	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	Kab. Balangan	100%	1.171.396.400	Rp 147.144.000,00		Inspektorat
Nilai PMPRB	Kab. Balangan	72	Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan		80						
Persentase Pencapaian Indikator MCP	Kab. Balangan	77	Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	Kab. Balangan		91						
Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	Kab. Balangan	WBK :4 WBBM:4										
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	30 Perangkat daerah	62.750.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	30 Perangkat daerah	27.500.000	-Rp 35.250.000,00		Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	15 perangkat daerah	301.600.000	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	30 perangkat daerah	122.800.000	-Rp 178.800.000,00		Inspektorat

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	1 kegiatan	562.612.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	1 kegiatan	973.606.000	Rp	410.994.000,00		Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	21 perangkat daerah	97.290.400	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	5 perangkat daerah	47.490.400	-Rp	49.800.000,00		Inspektorat

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan disusun dengan memperhatikan Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Terdapat 1 (satu) satu sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang selanjutnya menjadi indikator kinerja utama Inspektur Kabupaten Balangan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Balangan.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023

KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
B Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level kapabilitas APIP	Level 3
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	80%
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	WBK :1
	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	24
	Prosentase capaian realisasi renaksi RB	75
B	Indeks evektifitas pengendalian korupsi	2,8

Berdasarkan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Balangan tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Bupati Balangan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupkosinya adalah:

Tabel 2.7
Rincian Pendanaan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.19.013.498.660,-
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.4.817.988.000,-
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.1.171.396.400,-

Catatan : Pagu anggaran merupakan target program pada perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dapat diukur dengan beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Level kapabilitas APIP
- b. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBKBBM
- d. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB
- e. Prosentase capaian realisasi renaksi RB
- f. Indeks evektifitas pengendalian korupsi

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya efektivitas pengawasan internal” Inspektorat Kabupaten Balangan

menetapkan 2 (dua) program yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan didukung anggaran sebesar Rp.4.817.988.000,-
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan didukung anggaran sebesar Rp.1.171.396.400,-

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Inspektur, maka dilakukan Perjanjian Kinerja pada pejabat administrasi dibawahnya, berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2023:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	72 (BB)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Inspektorat	87,88

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2023:

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya unit kerja yang diusulkan ZI WBK/WBBM	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	20
2	Meningkatnya kualitas pengendalian rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan RB	Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	80
3	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi	Nilai MCP	91

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III ini indikator kinerja dan target sama karena secara struktur organisasi memiliki tugas dan fungsi yang sama tetapi berbeda wilayah binaan.

Tabel 2.10

Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	100%
2	meningkatnya kematangan mitigasi risiko	Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	50

3	Meningkatnya kualitas pengendalian evaluasi internal SAKIP	Prosentase OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	50
4	Meningkatnya Tata Kelola Kegiatan Penunjang Inspektorat	Prosentase terlaksananya tata kelola kegiatan operasional penunjang (Dokumen Perencanaan dan Penggajian pada Inspektorat)	100

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2023.

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023
Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20

5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60
9	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-
10	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	4
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
14	Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan	35

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
15	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2023.

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4

3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
---	---	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

LKIP tahun 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Balangan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategorisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Capaian rata-rata
atas Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi
III	66 % ≤ 75 %	Sedang
IV	51 % ≤ 65 %	Rendah
V	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dasar Sumber : Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Balangan yang tertera pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN**" dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- 1) Persentase SKPD / Desa di wilayah yang bebas temuan material
- 2) prosentase SKPD dengan nilai sakiip A

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja akhir RENSTRA 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tujuan dan Indikator Tujuan Akhir
RENSTRA 2021- 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Awal 2021	Target Akhir 2026	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Kategori
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase SKPD / Desa di wilayah yang bebas temuan material	-	90%	86%	95%	Sangat Tinggi
		prosentase SKPD dengan nilai sakiip A	-	12	-	-	Rendah

Tujuan diatas mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah berperan aktif dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama Periode RPJMD 2021-2026 yang di lakukan bersinergi di semua lingkup Pemerintah Daerah melalui pengawasan internal yang profesional sesuai standar dan etika profesi serta berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Persentase SKPD / Desa di wilayah yang bebas temuan material diukur dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal yaitu BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Balangan. Dimana hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan terdapat 4 SKPD yang terdapat temuan material dan 26 SKPD bebas dari temuan material.

Kemudian untuk indikator tujuan prosentase SKPD dengan nilai saki A diukur dari hasil evaluasi SAKIP SKPD yang dilaksanakan oleh TIM Evaluator dari APIP. Dari hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada SKPD yang mendapatkan predikat SAKIP A

2. Indikator Sasaran Strategis

Inspektorat menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja sasaran strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama / Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTR A	Capaian Terhadap Akhir RENSTR A	Kategori
				Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100%	Sangat Tinggi

	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	92%	80%	91%	107%	88%	103	Sangat Tinggi
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	na	WBK : 1	WBK : 0	0	0	0	Sangat Rendah
	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB		24	24	100	32	75	Sangat Tinggi
	Prosentase capaian realisasi renaksi RB		75	67	89	90	74	Tinggi
	Indeks evektifitas pengendalian korupsi		2,8	2,98	106	3,1	96	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa indikator kinerja jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM capaiannya masih sangat rendah, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja lainnya capaian kinerja sangat tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja capaian kinerjanya tinggi. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja eselon II dengan sasaran **'meningkatnya efektivitas pengawasan internal'**:

a. Level Kapabilitas APIP

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama / Eselon II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			

							RENSTRA	
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor:PE.09.03/LHP-291/PW16/3/2023 tanggal 30 November 2023 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dengan hasil cukup memadai Level Kapabilitas APIP Kabupaten Balangan pada level 3. Berikut ini merupakan perbandingan Level Kapabilitas APIP seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota, Provinsi se Kalimantan Selatan:

Tabel 3.5
Level Kapabilitas APIP Inspektorat se-Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Level Kapabilitas APIP
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3,00
2	Kabupaten Balangan	3,00
3	Kabupaten Banjar	3,00
4	Kabupaten Barito Kuala	3,00
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,00
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,00
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2,81
8	Kabupaten Kotabaru	2,00
9	Kabupaten Tabalong	3,00
10	Kabupaten Tanah Bumbu	3,00
11	Kabupaten Tanah Laut	3,00
12	Kabupaten Tapin	3,00
13	Kota Banjarbaru	3,00
14	Kota Banjarmasin	3,00

Sumber data: BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi rata-rata capaian level maturitas SPIP berada di level 3 kecuali kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih berada pada level 2,81 dan Kabupaten Kotabaru berada di level 2,00. Sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota Level Kapabilitas APIP kabupaten Balangan masuk dalam kategori tinggi.

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat telah membentuk satgas Penilaian Kapabilitas APIP dan telah melakukan Penilaian Mandiri atas pemenuhan data penilaian Kapabilitas APIP;
2. Dalam rangka peningkatan kualitas APIP pada tahun 2023 telah mengikutkan aparatur pengawas untuk mengikuti diklat baik yang bersifat umum maupun substansi dengan batas minimum 120 jam oleh setiap pengawas.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Level kapabilitas APIP pada Tahun 2023 yaitu Belum melakukan self assesment secara berkala dalam pemenuhan kelengkapan penilaian kapabilitas APIP. Sedangkan Faktor Pendorong keberhasilan capaian kinerja Level Kapabilitas APIP adalah telah terbentuk Tim Kapabilitas APIP dalam rangka pemenuhan penilaian Kapabilitas APIP.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mendorong capaian Level Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kalender diklat guna peningkatan kualitas aparatur pengawas dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan dengan berbasis risiko pada Tahun 2024;
3. Membentuk Satgas Penilaian Kapabilitas APIP.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Level Kapabilitas APIP terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Program Kegiatan Subkegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP

Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	80	55 pegawai	65 Pegawai	120	67
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Na	60 Pegawai	86 Pegawai	143	78

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program terealisasi diatas target yang ditetapkan pada tahun 2023. Kedua indikator kinerja memiliki capaian kinerja diatas 100%.

b. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTR A	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	92%	80%	91%	107%	88%	103	Sangat Tinggi

Pada Tahun 2023 untuk Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan realisasi sebesar 91% dari target tahun 2023 sebesar 80% atau dengan capaian 107% dalam kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi kinerja Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan pada tahun 2022 adalah sebesar 92% atau mengalami penurunan 1% dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penambahan rekomendasi yang cukup signifikan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 dan Pemeriksaan Kepatuhan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, Hibah, dan Bantuan Sosial. Berdasarkan Berita acara rekonsiliasi data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada hari senin sd jumat tanggal 11 sd 15

Desember 2023 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan capaian Kabupaten Balangan sebesar 91% menduduki peringkat ke 2 (dua) se-Kalimantan Selatan dimana peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sampai dengan tahun 2023 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan sebanyak 899 dan sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 815 rekomendasi, sementara 84 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh SKPD akan tetapi belum sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja indikator Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan desk pembahasan penyelesaian tindak lanjut dengan Tim BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Bersama seluruh SKPD yang belum selesai melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada SKPD yang terdapat temuan rekomendasi BPK dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
3. Membentuk Satgas monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Tindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP belum terlaksana sesuai jadwal dikarenakan perubahan mekanisme tindaklanjuti internal;
2. Rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut khususnya BPK dilakukan setiap semester sehingga Tim Monitoring Inspektorat kesulitan untuk melakukan pemantauan atas data dukung yang disampaikan oleh SKPD;
3. Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat perlu meningkatkan koordinasi oleh masing masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60

hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi;

4. Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggungan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menyelesaikan.

Faktor pendorong pencapaian kinerja Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Tahun 2023 yaitu Koordinasi yang intensif dengan SKPD Bersama BPK Perwakilan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mendorong capaian Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pemenuhan data atas rekomendasi yang diberikan;
2. Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat akan merencanakan melakukan kegiatan desk dengan BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan bersama SKPD terkait yang status tindak lanjutnya masih belum sesuai atau belum ditindaklanjuti;
3. Membentuk Satgas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;
4. Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pemeriksa lainnya.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Program Kegiatan Subkegiatan yang Mendukung Capaian
Indikator Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan

Indikator Program	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prosentase SKPD yang selesai TLHP	Na	50	66	132	101

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program terealisasi diatas target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu dengan capaian 132%.

Berikut ini tabel perbandingan capaian kinerja prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK se propinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2023

No	Pemda	Capaian
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	98,41
2	Kabupaten Balangan	90,65
3	Kabupaten Tanah Bumbu	85,45
3	Kabupaten Banjar	84,79
5	Kabupaten Barito Kuala	83,23
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	83,10
7	Kota Banjarbaru	82,23
8	Kota Banjarmasin	81,18
9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	80,75
10	Kabupaten Tanah Laut	80,30
11	Kabupaten Tabalong	79,98
12	Kabupaten Tapin	77,76
13	Provinsi Kalimantan Selatan	74,36
14	Kabupaten Kotabaru	63,72

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 2 (dua) se provinsi Kalimantan Selatan yaitu 90,65 atau melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2023.

- c. Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat ZI Menuju WBK WBBM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM	na	WBK : 1	WBK : 0	0	WBK :3 WBBM : 1	0	Sangat Rendah

Pada tahun 2023 Indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK target WBK 1 realisasi WBK 0 capaian 0%. Capaian penilaian indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat ZI menuju WBK WBBM dalam kategori **Sangat Rendah**.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/190/PW.04/2023 tanggal 27 November 2023 perihal hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 dimana tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK WBBM dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Evaluasi atas usulan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM Tahun 2023

No	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1	Unit kerja yang diusulkan	6	6	0
2	Unit kerja mendapat predikat	0	0	0
3	Tingkat keberhasilan	0%	0%	0%
4	Tidak memenuhi kriteria:		6	
	• Seleksi administrasi		0	
	• Desk evaluasi		6	
	• Observasi lapangan		0	

Secara umum rekomendasi atas hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 pada pemerintah kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja Bersama Tim Penilai Internal instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK WBBM;
- b. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembedaan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di pemerintah kabupaten Balangan agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
- c. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit

yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK WBBM.

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja indikator Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM adalah pada tahun 2023 Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM target sebesar 20% dari total seluruh SKPD di Kabupaten Balangan sebanyak 30 SKPD. SKPD yang diusulkan sebanyak 6 SKPD atau 20% dari total seluruh SKPD. SKPD yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK yaitu RSUD Kabupaten Balangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/190/PW.04/2023, 6 SKPD Kabupaten Balangan yang diusulkan tidak ada yang lolos untuk mendapatkan predikat WBK.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM pada Tahun 2023 yaitu:

1. Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh TPI terhadap unit kerja dalam Pembangunan ZI menuju WBK WBBM;
2. Unit kerja masih belum optimal dalam memenuhi data dukung penilaian Zona Integritas.

Faktor pendukung pencapaian kinerja Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM pada Tahun 2023 yaitu:

1. SKPD/Unit Kerja yang akan diusulkan mendapat predikat WBK telah di SK dalam SK Bupati;
2. Telah dilakukan PMZI oleh Tim TPI pada setiap tahunnya;
3. Asistensi oleh Tim TPI dalam pemenuhan LKE PMZI OPD.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mendorong capaian Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Predikat ZI menuju WBK WBBM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan secara intensif kepada SKPD yang akan diusulkan pembangunan ZI menuju WBK WBBM
2. Melakukan sosialisasi kepada SKPD khususnya unit kerja yang bersifat pelayanan dalam rangka perluasan SKPD pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program Kegiatan Subkegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat ZI Menuju WBK WBBM

Indikator Program	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	Na	20	20	100	64

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program terealisasi sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu dengan capaian 100%.

d. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	20	24	24	100	32	75	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan dari 30 SKPD terdapat 24 SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB dan 6 SKPD mendapatkan hasil B. dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 capaian untuk indikator Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB adalah 100 % dari target 24 realisasi 24.

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam rangka peningkatan capaian indikator Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD, yaitu dari 30 SKPD sebanyak 17 SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;
2. Bersama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dan Bappeda sebagai koordinator SAKIP melakukan pendampingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan LKj SKPD;
3. Inspektorat telah melakukan evaluasi SAKIP seluruh SKPD dan telah melakukan reviu Lkj Kabupaten Balangan Tahun 2022;

4. Melakukan asistensi dan pendampingan Bersama dengan Organisasi dan Bappedarida dalam penyusunan cascading dan pohon kinerja baik dilingkup SKPD maupun Kabupaten dengan narasumber dari Kemenpan RB.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB pada Tahun 2023 yaitu kelengkapan dokumen SKPD belum terpenuhi secara optimal sesuai permintaan tim evaluator.

Faktor pendukung pencapaian kinerja Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB pada Tahun 2023 yaitu:

1. Telah dilakukan asistensi penyusunan LKj SKPD;
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD oleh TIM APIP.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mendorong capaian kinerja Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada seluruh SKPD;
2. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;
3. Peningkatan kapasitas evaluator melalui Pendidikan/diklat substansi SAKIP.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program Kegiatan Subkegiatan yang Mendukung Capaian
Indikator Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB

Indikator Program	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	Na	50	57	114	71

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program terealisasi diatas target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu dengan capaian 114%.

e. Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTR A	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Prosentase capaian realisasi renaksi RB	Na	75	67	89	90	74	Tinggi

Capaian indikator prosentase capaian renaksi RB pada tahun 2023 adalah sebesar 89% dari target 75% realisasi 67%. Terdapat 282 Rencana Aksi RB dan realisasi atas rencana aksi tersebut sebanyak 195, berikut ini tabel capaian realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023:

Tabel 3.15
Realisasi Rencana Aksi RB Tahun 2023

No	Tema RB	Jumlah Renaksi	Realisasi Renaksi	Capaian
1	RB General	130	104	80
2	RB Tematik			
	Kemiskinan	77	38	49
	Stunting	53	39	74
	Inflasi	4	3	75
	P3DN	10	6	60
	Investasi	8	5	63
Total		282	195	67

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam rangka peningkatan capaian indikator Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat telah menelaah dokumen Roadmap yang meliputi kesesuaian Sasaran, Indikator dan Target serta kesesuaian Rencana Aksi Unit Kerja dengan Rencana Aksi Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat telah melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Aksi serta memastikan bahwa Rencana Aksi tersebut telah dilakukan oleh Unit Kerja.

Faktor penghambat pencapaian kinerja indikator Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi atas capaian realisasi rencana aksi RB hanya dilakukan pada Triwulan III;
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan belum mengakomodir Monitoring dan evaluasi atas capaian realisasi rencana aksi RB;
3. Belum dipahaminya peraturan terbaru dalam evaluasi Reformasi Birokrasi

Faktor pendukung pencapaian kinerja indikator Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi internal yg meliputi ex-ante dan on-going sd Tw III RB General dan tematik;
2. Tim Reformasi Birokrasi telah mengikuti coaching klinik RB General dan RB Tematik Tahun 2023

Upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk mendorong capaian kinerja Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam rangka pemenuhan atas Rencana Aksi yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Program Kegiatan Subkegiatan yang Mendukung Capaian
Indikator Prosentase Capaian Realisasi Renaksi Reformasi Birokrasi

Indikator Program	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	Na	80	67	83	76

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program realisasi pada tahun 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 83%.

f. Indeks evektifitas pengendalian korupsi

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Indeks evektifitas pengendalian korupsi	Na	2,8	2,98	106	3,1	96	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023, Indeks evektifitas pengendalian korupsi berada pada point 2,98 dimana target pada tahun

2023 adalah 2,8 atau dengan capaian 106. Dari hasil evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan Indeks epektifitas pengendalian korupsi area of improvement adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian dan mitigasi risiko fraud belum dilakukan diseluruh OPD
- b. Analisis dan penilaian risiko untuk menghasilkan rancangan tindak pengendalian dalam memitigasi risiko korupsi belum terpetakan
- c. Penerapan Wishtleblowing System belum optimal karena reward belum diterapkan

Berikut ini perbandingan level Indeks epektifitas pengendalian korupsi seluruh kabupaten/kota se propinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 3.18
Indeks epektifitas pengendalian korupsi Kabupaten/Kota
Se Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IEPK
1	Provinsi Kalimantan Selatan	2,830
2	Kabupaten Balangan	2,980
3	Kabupaten Banjar	2,940
4	Kabupaten Barito Kuala	2,60
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,160
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,000
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2,79
8	Kabupaten Kotabaru	2,430
9	Kabupaten Tabalong	2,93
10	Kabupaten Tanah Bumbu	2,74
11	Kabupaten Tanah Laut	2,900
12	Kabupaten Tapin	2,900
13	Kota Banjarbaru	2,900
14	Kota Banjarmasin	3,000

Sumber data : BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kabupaten kota yang telah berhasil mencapai level 3 atas Indeks epektifitas pengendalian korupsi, sehingga perlu ditingkatkan capaian untuk Kabupaten Balangan.

Upaya Inspektorat yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam rangka peningkatan capaian indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat telah melakukan Penjaminan Kualitas atas SPIP Terintegrasi dimana salah satu penilaiannya adalah terkait penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan hasil 3,32;
2. Inspektorat telah melakukan pendampingan atau asistensi atas pengisian LKE SPIP Terintegrasi.

Faktor penghambat pencapaian kinerja indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian dan mitigasi risiko fraud belum dilakukan diseluruh OPD;
2. Analisis dan penilaian risiko untuk menghasilkan rancangan tindak pengendalian dalam memitigasi risiko korupsi belum terpetakan.

Faktor pendorong pencapaian kinerja indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi adalah telah terdapat pedoman pengendalian fraud di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi terdapat beberapa indikator kinerja program yang menunjang pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Kinerja Program yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Strategis

Indikator Program	2022	2023			Capaian 2023 thdp Akhir Renstra
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai MCP	91	91	91	100	96

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indikator kinerja program terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 100%.

3.2 Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menurut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumberdaya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja pemerintahan dan pelayanan public saat ini dituntut berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat sangat berharap terhadap tingginya respon dan layanan yang bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian terhadap kondisi tersebut dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi sejalan dengan upaya pemenuhan jalannya pemerintahan dalam kerangka Pembangunan ekosistem E-Government.

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan telah menyusun 2 (dua) inovasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tata Kelola pengawasan serta pengendalian intern pemerintahan. Adapun inovasi tersebut yaitu:

a. YADU MANGAN (LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BALANGAN)

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran juga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

YADU MANGAN ini merupakan satu inovasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengawasan melalui Media Sosial Whatsapp. Melalui layanan ini diharapkan dapat

mempermudah masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait penyimpangan yang terjadi pada satuan kerja di wilayahnya sehingga proses pengaduan dan penanganannya juga lebih cepat, dan juga memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya peran masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mempermudah terwujudnya pemerintahan yang baik.

Layanan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Kabupaten Balangan dilaksanakan dalam rangka mempermudah masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait penyimpangan yang terjadi pada satuan kerja di wilayahnya sehingga proses pengaduan dan penanganannya juga lebih cepat dengan Langkah sebagai berikut :

1. Membuka aplikasi Whatsapp
2. Menghubungi Nomor layanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Balangan yaitu : 0877-1414-0408.
3. Mengirim Dokumen laporan Pengaduan yang terdiri dari
 - Data Diri Pelapor
 - Data diri yang dilaporkan
 - Surat pengaduan
 - Data dukung yang lengkap dan Sah.
4. Verifikasi Data dukung oleh Admin sekretariat layanan Pengaduan Masyarakat

b. SAPA (SAKU PENGAWAS)

SAPA (Saku Pengawas) adalah inovasi ini merupakan aplikasi pertama di Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan yang bisa digunakan baik oleh Pejabat Struktural, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah maupun Staf Fungsional lainnya dalam mencari regulasi untuk mempermudah perencanaan penugasan.

Adanya aplikasi SAPA (Saku Pengawas) di Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan diharapkan dapat membantu Pejabat Struktural, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Staf Fungsional lainnya pada saat perencanaan penugasan dalam mencari regulasi yang dibutuhkan. Adapun manfaat dari adanya Aplikasi SAPA (Saku Pengawas) adalah:

1. Mempermudah Pejabat Struktural, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Staf Fungsional lainnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Balangan Yang Transparan, Responsif, dan Akuntabel Melalui Pengawasan Yang Profesional” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”;
2. Tersedianya media Pengelompokan dasar hukum untuk Pejabat Struktural, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Staf Fungsional lainnya; dan
3. Pejabat Struktural, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Staf Fungsional lainnya dimudahkan dalam mencari dasar Hukum yang diperlukan melalui media yang disediakan.

Selain itu diharapkan kedepannya, masyarakat juga bisa mengakses dan menggunakan aplikasi SAPA (Saku Pengawas) sebagai wujud dari transparansi pemerintah

3.3 Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Balangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai 5 indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan sebesar Rp.5.989.384.400,- dari pagu total sebesar Rp.25.002.883.060,-

Berdasarkan data tahun anggaran 2023, realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan TA 2023	Realisasi Keuangan	Capaian
ANGGARAN TA 2023		25.002.883.060,-	21.665.401.766,-	86%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.013.498.660,-	16.356.597.631	86,03%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.762.400,-	62.168.220,-	63,59%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.978.400,-	6.708.400,-	27%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.784.000,-	55.459.820,-	75%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.601.306.610,-	7.687.059.098,-	80%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.601.306.610,-	7.687.059.098,-	80%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.043.543.000,-	2.610.223.366,-	85%

3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.503.000,-	92.160.000,-	89%
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.039.095.000,-	857.529.632,-	82%
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.901.945.000,-	1.660.533.734,-	87%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.673.209.900,-	2.618.868.435,-	97%
4.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.334.179.800,-	1.317.574.000,-	98%
4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.295.600,-	51.057.200,-	99%
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.748.500,-	6.748.500,-	100%
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.280.986.000,-	1.243.488.735,-	97%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.175.585.800,-	2.109.294.681,-	96%
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.485.500.000,-	1.421.510.000,-	95%
5.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	690.085.800,-	687.784.681,-	99%

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.140.950,-	307.568.850,-	81%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.003.500,-	6.552.000,-	65%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.451.450,-	144.030.970,-	77%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.686.000,-	156.985.880,-	87%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.950.000,-	961.414.981,-	91%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.530.300,-	344.207.900,-	81%
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	626.419.700,-	617.207.081,-	98%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.817.988.000,-	4.318.913.370,-	89%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.100.500.000,-	3.671.493.950,-	89%
1.1	Pengawasan Kinerja	375.620.000,-	305.860.000,-	81%

	Pemerintah Daerah			
1.2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	325.050.000,-	222.635.000,-	68%
1.3	Reviu Laporan Kinerja	18.800.000,-	17.655.000,-	93%
1.4	Reviu Laporan Keuangan	2.600.000,-	2.475.000,-	95%
1.5	Pengawasan Desa	3.105.600.000,-	3.001.862.750,-	96%
1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	272.830.000,-	121.006.200,-	44%
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	717.488.000,-	647.419.420,-	90%
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	263.638.000,-	196.334.420,-	74%
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	453.850.000,-	451.085.000,-	99%
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.171.396.400,-	989.890.765,-	84%
1	Pendampingan dan Asistensi	1.171.396.400,-	989.890.765,-	84%
1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	27.500.000,-	21.375.000,-	77%
1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	122.800.000,-	82.930.000,-	67%

1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	973.606.000,-	868.795.765,-	89%
1.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47.490.400,-	16.790.000	35%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keunagan Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan sebesar 86% atau terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 3.337.481.294,-. Adapun sisa anggaran paling banyak ada pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.1.914.247.512,- atau hanya terserap 80%. Sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan pada anggaran perubahan inspektorat mengalokasikan penambahan pagu gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.481.516.150,- dari pagu sebelum perubahan yaitu Rp.7.119.790.460,- Dimana alokasi anggaran ini diperuntukan bagi ASN yang yang lulus uji kompetensi PPUPD sebanyak 34 orang akan tetapi sampai dengan bulan desember prosesnya belum selesai sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi. Adapun realisasi fisik untuk semua sub kegiatan, kegiatan dan program telah tercapai 100%.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 3 (tiga) Rensta Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat Kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Namun demikian masih terdapat Indikator Kinerja yang masih jauh dari target yang telah sehingga masih perlu Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel" dengan indikator kinerja:

1. Level Kapabilitas APIP realisasi Level 3 atau dengan capaian 100%;
2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan realisasi 91% atau dengan capaian 103%;
3. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK WBBM realisasi 0 atau dengan capaian 0%;
4. Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB realisasi 24 atau dengan capaian 100%;
5. Prosentase capaian realisasi renaksi RB realisasi 67% atau dengan capaian 90%;
6. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi realisasi 2,98 atau dengan capaian 106%.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

